

## KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

17. 65

### PELAKSANA KEGIATAN 2017

#### 1. NAMA KEGIATAN: ASISTENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### 2. RUJUKAN, YANG MELIPUTI:

- a. KAK Perencanaan Nomor: ..... 2017
- b. RPJMD : Misi RPJMD Nomor 3 tentang Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Melalui Peningkatan Pelayanan Profesional.
- c. Rentra SKPD : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan Administrasi Investasi dan Pembiayaan

#### 3. LATAR BELAKANG

##### A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- b. Undang –Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang Kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012
- h. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
- i. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi

##### B. Gambaran Umum

Pengelolaan keuangan Daerah tidak hanya menyangkut perlunya peraturan pendukungnya dan saranaprasarana, namun yang paling penting adalah dimilikinya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang dapat diandalkan.

Untuk itu maka persamaan pemahaman peraturan terkait pengelolaan keuangan untuk mempermudah pengelolaan akuntansi dari keuangan Daerah sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara benar.

##### C. Data Dukung Rencana Kegiatan

- a) Sumber Pendanaan
- b) Sumber Daya Manusia

#### 4. Keluaran Kegiatan/Ouput

Perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

#### 5. Strategi Pencapaian Keluaran

Methodode pelaksanaan.

- Praktek.

Jadwal Tahapan Pelaksanaan

No	Uraian Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1..	Uang lembur									x	x		
2.	Belanja Bahan Pakai Habis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	Jasa servis pelayanan Kantor dan rumah tangga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.	Belanja Penggandaan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.	Sewa sarana mobilitas darat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6.	B.M Pengadaan Komputer										x	x	

6. Waktu Pelaksanaan

- Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember

7. Spesifikasi Teknis

- -

8. Biaya yang diperlukan **Rp. 59.732.000,-**

a) Honor lembur	:	44.832.000,-
b) Belanja Bahan Pakai Habis	:	900.000,-
c) Jasa servis pelayanan Kantor dan rumah tangga	:	1.000.000,-
d) Belanja Penggandaan	:	3.000.000,-
e) Sewa sarana mobilitas darat	:	5.000.000,-
f) B.M Pengadaan Komputer	:	5.000.000,-

9. Penerima Manfaat Semua Dinas/Badan/Kantor dan lembaga baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten.

10. Monitoring Dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan bulan januari sampai bulan Desember.

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**MUCHAMMAD TAUFAN, S.Sos**

Nip. 19590504 198603 1 020

**LULUK ALIFAH, SE**

NIP. 19691128 200312 2 008

Mengetahui  
Pengguna Anggaran

**M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19641117 199301 1 003